



MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 004 /A/JA/02/2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PARINGIN
DALAM DAERAH HUKUM-KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN,
KEJAKSAAN NEGERI TOBOALI DAN KEJAKSAAN NEGERI Koba DALAM
DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
KEJAKSAAN NEGERI LABUAN BAJO DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN
TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI LASUSUA DALAM
DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA, KEJAKSAAN
NEGERI DAIK LINGGA DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU, KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU DALAM DAERAH HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT, KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG TIGA
REDELONG DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM, DAN KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA DALAM DAERAH HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pada saat ini telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Koba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa, perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Rincian tugas dan wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Koba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Kejaksaan Negeri

Tigaraksa ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Paringin dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Negeri Toboali dan Kejaksaan Negeri Koba dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri Lasusua dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Daik Lingga dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Sekadau dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ke Kecamatan Tigaraksa di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3597);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Koba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa;
12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : B/160/M. PAN/1/2009 tanggal 29 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PARINGIN DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN, KEJAKSAAN NEGERI TOBOALI DAN KEJAKSAAN NEGERI KOBA DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, KEJAKSAAN NEGERI LABUAN BAJO DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI LASUSUA DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA, KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU, KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN

**BARAT, KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM, DAN KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA
DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI BANTEN.**

- PERTAMA** : Kejaksaan Negeri Tigaraksa berkedudukan di Tigaraksa dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Tangerang sebagai Kejaksaan Negeri tipe A. Kejaksaan Negeri Paringin berkedudukan di Paringin dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Balangan, Kejaksaan Negeri Toboali berkedudukan di Toboali dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kejaksaan Negeri Koba berkedudukan di Koba dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo berkedudukan di Labuan Bajo dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kejaksaan Negeri Lasusua berkedudukan di Lasusua dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Kejaksaan Negeri Daik Lingga berkedudukan di Daik Lingga dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau berkedudukan di Sekadau dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong berkedudukan di Simpang Tiga Redelong dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Bener Meriah, masing-masing sebagai Kejaksaan Negeri tipe B.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan wewenang serta fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Koba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 624 sampai dengan 677 BAB XVII Bagian Ketiga belas sampai dengan Ketujuh belas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.
- KETIGA** : Semua pegawai dan barang inventaris baik barang bergerak maupun tak bergerak Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Labuan Bajo menjadi milik Kejaksaan Negeri Labuan Bajo.
- KEEMPAT** : Nama dan tipe Kejaksaan Negeri Tigaraksa, Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Koba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong sebagaimana tercantum pada Lampiran I dalam daftar nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia, sedangkan bagan organisasi tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Jaksa Agung ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KELIMA : Sejak berlakunya peraturan ini, di seluruh Indonesia terdapat 31 Kejaksaan Tinggi, 77 Kejaksaan Negeri tipe A, 310 Kejaksaan Negeri tipe B dan 89 Cabang Kejaksaan Negeri.

KEENAM : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Februari 2009

H JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	13-02-09
2.	Karo Cana	<i>[Signature]</i>	13-02-09
3.	Kabag	<i>[Signature]</i>	09-02-09
4.	Kasubbag	<i>[Signature]</i>	09-02-09
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	9-02-09
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	09-02-09

DAFTAR NAMA KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI DAN
 CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH	1	BANDA ACEH	A	1	SIGLI DI KOTA BAKTI SIGLI DI MEUREUDU
		2	SABANG	B		
		3	SIGLI	B	2	
		4	LHOKSEUMAWE	B	3	TAPAKTUAN DI BAKONGAN
		5	LANGSA	B		
		6	TAKENGON	B		
		7	MEULABOH	B		
		8	TAPAKTUAN	B		
		9	KUTACANE	B		
		10	BIREUEN	B		
		11	LHOKSUKON	B		
		12	IDI	B		
		13	KUALA SIMPANG	B		
		14	SINABANG	B		
		15	CALANG	B		
		16	SINGKEL	B		
		17	BLANGKEJEREN	B		
		18	JANTHOI	B		
		19	BLANGPIDIE	B		
		20	SUKAMAKMUE	B		
		21	SIMPANG TIGA REDELONG	B		
II	SUMATERA UTARA DI MEDAN	1	MEDAN	A	1	LUBUK PAKAM DI PANCUR BATU LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI
		2	BINJAI	A		
		3	PEMATANG SIANTAR	A		
		4	SIBOLGA	A		
		5	LUBUK PAKAM	A	2	
		6	TEBING TINGGI	B	3	RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG KABANJAHE DI TIGA BINANGA
		7	TANJUNG BALAI	B		
		8	RANTAU PRAPAT	B	4	
		9	KABANJAHE	B		
		10	SIDIKALANG	B		
		11	TARUTUNG	B	5	TARUTUNG DI SIBORONG- BORONG
		12	PADANG SIDEMPUAN	B	6	PADANG SIDEMPUAN DI SIPIROK
					7	PADANG SIDEMPUAN DI SUBUHUAN
					8	PADANG SIDEMPUAN DI GUNUNG TUA
		13	GUNUNGSITOLI	B	9	GUNUNG SITOLI DI PULAU TELO
		14	KISARAN	B	10	GUNUNG SITOLI DI TELUK DALAM
		15	SIANTAR	B	11	KISARAN DI LABUHAN RUKU
		16	STABAT	B	12	STABAT DI PANGKALAN BRANDAN
		17	BELAWAN	B		
		18	BALIGE	B	13	BALIGE DI PORSEA
					14	BALIGE DI PANGURURAN
		19	PANYABUNGAN	B	15	PANYABUNGAN DI KOTANOPAN
					16	PANYABUNGAN DI NATAL

1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	PADANG BUKITTINGGI PAYAKUMBUH PARIAMAN SAWAHLUNTO SOLOK PADANG PANJANG BATUSANGKAR LUBUK SIKAPING PAINAN SIJUNJUNG LUBUK BASUNG TUA PEJAT SIMPANG EMPAT PULAU PUNJUNG PADANG ARO	A A B B B B B B B B B B B B	1 2 5 6 7 8	PAYAKUMBUH DI PKL KOTA BARU PAYAKUMBUH DI SULIKI SOLOK DI MUARA LABUH SOLOK DI ALAHAN PANJANG PAINAN DI BALAI SELASA SIJUNJUNG DI SUNGAI DAREH LUBUK BASUNG DI MANINJAU SIMPANG EMPAT DI TALU
IV	RIAU DI PEKANBARU	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	PEKANBARU RENGAT DUMAI BENGKALIS TEMBILAHAN BANGKINANG PASIR PANGARAIAAN SIK SRI INDRAPURA TELUK KUANTAN PANGKALAN KERINCI UJUNG TANJUNG	A B B B B B B B B B B	1	BENGKALIS DI SELAT PANJANG
V	JAMBI DI JAMBI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	JAMBI MUARA BULIAN MUARA BUNGO SUNGAI PENUH BANGKO KUALA TUNGKAL SAROLANGUN MUARA TEBO MUARA SABAK SENGETI	A B B B B B B B B B	1 2	MUARA BULIAN DI MUARA TEMBESI KUALA TUNGKAL DI NIPAH PAJANG
VI	SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	PALEMBANG KAYU AGUNG BATURAJA LAHAT LUBUK LINGGAU MUARA ENIM SEKAYU PRABUMULIH PAGAR ALAM PANGKALAN BALAI	A B B B B B B B B B	1 2 3 4	BATURAJA DI MARTAPURA BATURAJA DI MUARA DUA LAHAT DI TEBING TINGGI MUARA ENIM DI PENDOPO

1	2	3	4	5	6	7
XI	JAWA TENGAH DI SEMARANG	1	SEMARANG	A	1	SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG
		2	SURAKARTA	A		
		3	PEKALONGAN	A		
		4	MAGELANG	A		
		5	PURWOKERTO	A		
		6	TEGAL	A		
		7	PATI	A		
		8	CILACAP	A		
		9	KUDUS	B		
		10	KLATEN	B		
		11	SALATIGA	B		
		12	REMBANG	B		
		13	PEMALANG	B		
		14	PURBALINGGA	B		
		15	PURWOREJO	B		
		16	KEBUMEN	B		
		17	SRAGEN	B		
		18	KENDAL	B		
		19	BLORA	B		
		20	BOYOLALI	B		
		21	BREBES	B		
		22	DEMAK	B		
		23	JEPARA	B		
		24	KARANGANYAR	B		
		25	SUKOHARJO	B		
		26	WONOGIRI	B		
		27	BANJAR NEGARA	B		
		28	TEMANGGUNG	B		
		29	WONOSOBO	B		
		30	BANYUMAS	B		
		31	BATANG	B		
		32	PURWODADI	B		
		33	AMBARAWA	B		
		34	SLAWI	B		
		35	MUNGKID	B		
		36	KAJEN	B		
XII	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA	1	YOGYAKARTA	A		
		2	SLEMAN	A		
		3	WONOSARI	B		
		4	WATES	B		
		5	BANTUL	B		
XIII	JAWA TIMUR DI SURABAYA	1	SURABAYA	A		
		2	MALANG	A		
		3	JEMBER	A		
		4	KEDIRI	A		
		5	MADIUN	A		
		6	PASURUAN	A		
		7	BOJONEGORO	A		
		8	BONDOWOSO	A		
		9	PAMEKASAN	A		
		10	SIDOARJO	A		
		11	KEPANJEN	A		
		12	MOJOKERTO	B		

1	2	3	4	5	6	7
		13	PROBOLINGGO	B		
		14	BANYUWANGI	B		
		15	BLITAR	B		
		16	JOMBANG	B		
		17	PONOROGO	B		
		18	GRESIK	B		
		19	LUMAJANG	B		
		20	TULUNG AGUNG	B		
		21	TRENGGALEK	B		
		22	NGANJUK	B		
		23	MAGETAN	B		
		24	TUBAN	B		
		25	NGAWI	B		
		26	SUMENEP	B		
		27	LAMONGAN	B		
		28	SAMPANG	B		
		29	BANGKALAN	B		
		30	PACITAN	B		
		31	SITUBONDO	B		
		32	BANGIL	B		
		33	KRAKSAAN	B		
		34	TANJUNG PERAK	B		
		35	B A T U	B		
XIV	KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK	1	PONTIANAK	A		
		2	SINGKAWANG	A	1	SINGKAWANG DI PAMANGKAT
		3	SINTANG	B		
		4	KETAPANG	B		
		5	SANGGAU	B	2	SANGGAU DI ENTIKONG
		6	MEMPAWAH	B		
		7	PUTUSIBAU	B		
		8	SAMBAS	B		
		9	BENGKAYANG	B		
		10	NGABANG	B		
		11	SEKADAU	B		
XV	KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKARAYA	1	PALANGKARAYA	A		
		2	SAMPIT	B		
		3	KUALA KAPUAS	B	1	KUALA KAPUAS DI PALINGKAU
		4	MUARA TEWEH	B		
		5	PANGKALANBUN	B		
		6	BUNTOK	B		
		7	PURUK CAHU	B		
		8	TAMIANG LAYANG	B		
		9	KASONGAN	B		
		10	KUALA PEMBUANG	B		
		11	SUKAMARA	B		
		12	NANGA BULIK	B		
		13	KUALA KURUN	B		
		14	PULANG PISAU	B		

1	2	3	4	5	6	7
XVI	KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	BANJARMASIN KANDANGAN KOTABARU MARTAPURA AMUNTAI BARABAI TANJUNG RANTAU PLEIHARI MARABAHAN BANJARBARU BATULICIN PARINGIN	A B B B B B B B B B B B B		
XVII	KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	BALIKPAPAN SAMARINDA TENGGARONG TANAH GROGOT TANJUNG REDEP TARAKAN NUNUKAN BONTANG TANJUNG SELOR SENDAWAR SANGATTA MALINAU PENAJAM	A A A B B B B B B B B B B		
XVIII	SULAWESI UTARA DI MANADO	1 2 3 4 5 6 7 8 9	MANADO TONDANO KOTAMOBAGU TAHUNA BITUNG TOMOHON AMURANG MELONGUANE AIRMADIDI	A B B B B B B B B	1 2 3 4	KOTAMOBAGU DI BAROKO KOTAMOBAGU DI DOMUGA TAHUNA DI SIAU MELONGUANE DI BEO
XIX	SULAWESI TENGAH DI PALU	1 2 3 4	PALU LUWUK TOLI-TOLI POSO	A B B B	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	LUWUK DI BUNTA LUWUK DI PAGIMANA TOLI-TOLI DI LAULALANG TOLI-TOLI DI OGOTUA TOLI-TOLI DI BANGKIR POSO DI AMPANA POSO DI KOLONADALE POSO DI TENTENA POSO DI UNA-UNA/ WAKAI POSO DI BUNGKU

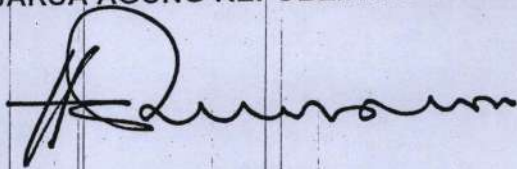
1	2	3	4	5	6	7
XX	SULAWESI TENGGARA DI KENDARI	5	DONGGALA	B	11	DONGGALA DI SABANG
		6	BANGGAI	B	12	DONGGALA DI TOMPE
		7	PARIGI	B	13	PARIGI DI TINOMBO
		8	BUOL	B	14	PARIGI DI MOUTONG
					15	BUOL DI PALELEH
					16	BUOL DI LOKODIDI
		1	KENDARI	A		
		2	BAU-BAU	B		
		3	KOLAKA	B		
		4	RAHA	B		
		5	UNAAHA	B		
		6	WANGI-WANGI	B		
		7	LASUSUA	B		
XXI	SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR	1	MAKASSAR	A	1	MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR
		2	PARE-PARE	A		
		3	PALOPO	A		
		4	SUNGGUMINASA	A	2	SUNGGUMINASA DI MALINO
		5	WATAMPONE/BONE	A	3	BONE DI POMPANUA
					4	BONE DI LAPARIAJA
					5	BONE DIKAJUARA
		6	MAMUJU	B		
		7	MAROS	B	6	MAROS DI CAMBA
		8	BANTAENG	B		
		9	PINRANG	B		
		10	SENGKANG	B		
		11	SOPPENG	B		
		12	BARRU	B		
		13	BULUKUMBA	B	7	BALUKUMBA DI KAJANG
		14	JENEPONTO	B		
		15	ENREKANG	B		
		16	MAJENE	B		
		17	MAKALE	B	8	MAKALE DI RANTEPAO
		18	PANGKAJENE	B		
		19	SELAYAR	B		
		20	POLEWALI	B		
		21	SIDENRENGRAPPANG	B		
		22	SINJAI	B		
		23	TAKALAR	B		
		24	MASAMBA	B		
		25	MAMASA	B		
		26	BELOPA	B		
		27	MALILI	B	9	MALILI DI WOTU

1	2	3	4	5	6	7
XXVI	PAPUA DI JAYAPURA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	JAYAPURA BIAK MANOKWARI SORONG FAK-FAK MERAUKE WAMENA NABIRE SERUI TIMIKA	A B B B B B B B B B		
XXVII	MALUKU UTARA DI SOFIFI	1 2 3 4 5 6	TERNATE SOASIU TOBELO LABUHA SANANA WEDA	B B B B B B	1 2	TERNATE DI MOROTAI TERNATE DI JAILOLO
XXVIII	BANTEN DI SERANG	1 2 3 4 5 6	SERANG TANGERANG TIGARAKSA PANDEGLANG RANGKASBITUNG CILEGON	A A A B B B		
XXIX	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI PANGKAL PINANG	1 2 3 4 5 6 7	PANGKAL PINANG SUNGAILIAT TANJUNG PANDAN MENTOK MANGGAR TOBOALI KOBAL	A B B B B B B	1	SUNGAILIAT DI BELINYU
XXX	GORONTALO DI KOTA GORONTALO	1 2 3 4 5	LIMBOTO GORONTALO TILAMUTA SUWAWA MARISA	B B B B B	1	LIMBOTO DI KWANDANG.

1	2	3	4	5	6	7
XXXI	KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG	1	TANJUNG PINANG	A	1	TANJUNG PINANG DI DABO SINGKEP
		2	B A T A M TANJUNG BALAI KARIMUN	A	2	TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO
		3		B		
		4		R A N A I DAIK LINGGA		
		5	B			
J U M L A H		77/310		A/B	89	

Februari 2009.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



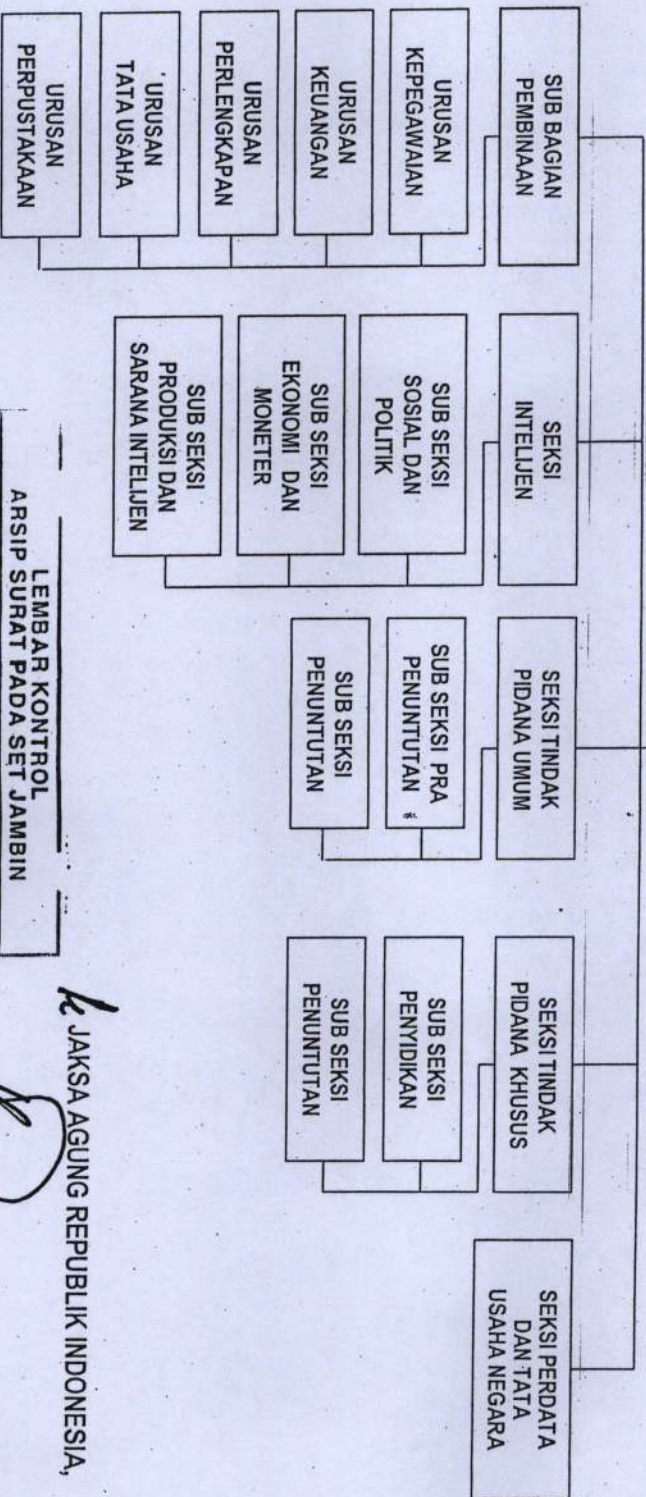
HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		12-02-09
2.	Karo Cana		6-02-09
3.	Kabag		9-2-09
4.	Kasubbag		09-02-09
5.	Pelaksana		9-2-09
6.	Pengetik		09-02-09

BAGAN ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA

Lampiran II : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER- 004 /AJA/02/2009
Tanggal : 18 Februari 2009

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIPE A



LEMBAR KONTROL
ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN

No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	13-02-09
2.	Karo Cana	<i>[Signature]</i>	10-02-09
3.	Kabag	<i>[Signature]</i>	09-01-09
4.	Kasubbag	<i>[Signature]</i>	09-07-09
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	09-02-09
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	09-02-09

h JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

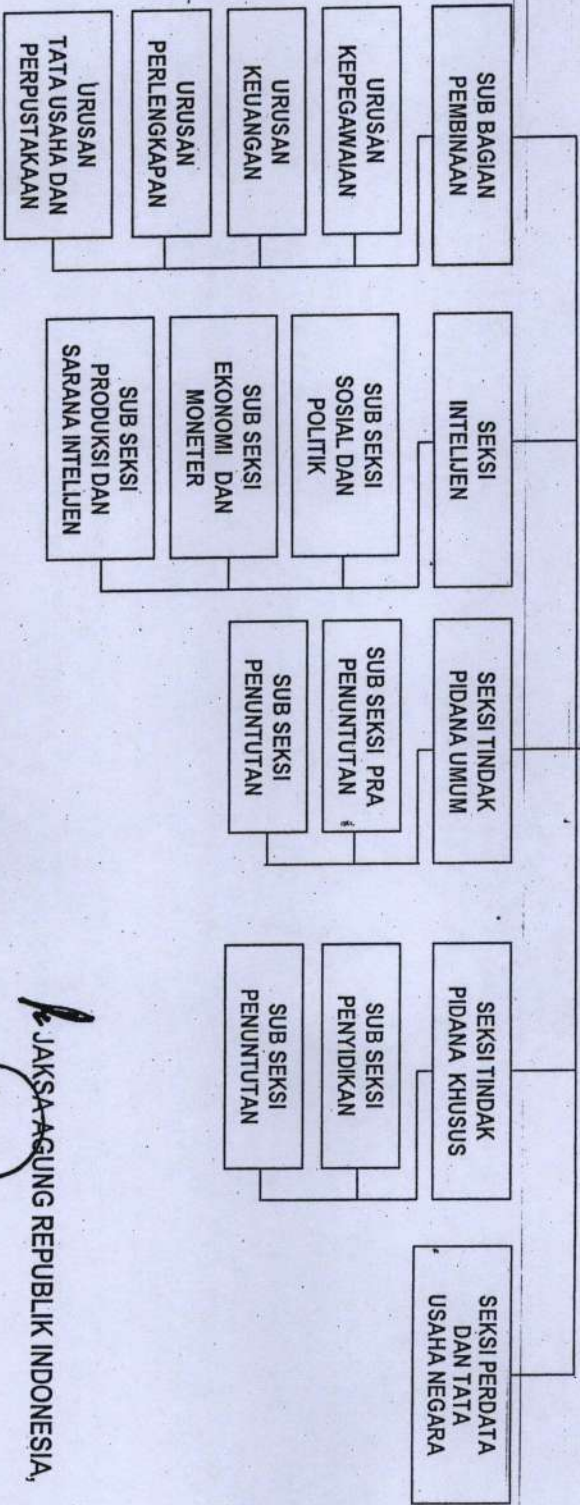
[Signature]

HENDARMAN SUPANDJI

BAGAN ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI PARINGIN,
KEJAKSAAN NEGERI TOBOALI, KEJAKSAAN NEGERI
KOB, KEJAKSAAN NEGERI LABUAN BAJO, KEJAKSAAN
NEGERI LASUSUA, KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA,
KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU, DAN KEJAKSAAN
NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Lampiran III : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER- 004 /AJA/02/2009
Tanggal : 18 Februari 2009

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TYPE B



LEMBAR KONTROL		
ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN		
No.	PEJABAT	PARAF TANGGAL
1.	Sesjam Bin	13-02-09
2.	Karo Cana	10-02-09
3.	Kabag	09-02-09
4.	Kasubbag	09-02-09
5.	Pelaksana	09-02-09
6.	Pengetik	09-02-09

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI